



**PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK**  
**KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok  
Jl. Raya Solok-Padang Km. 20 Arosuka Propinsi Sumatera Barat Kode Pos 27364  
Telepon (0755)31330,31331 Faks(0755) 31333

**NOTULEN RAPAT**

Acara                      Rapat Pembahasan Penolakan Masyarakat Batu Bajanjang terhadap rencana pembangunan Geothermal bersama KOMNAS HAM RI

Hari/Tanggal            Kamis/3 Mei 2018

Pimpinan Rapat        Plt. Sekretaris Daerah (Drs.H.SUHARMEN, MM)

Peserta Rapat          Sebagaimana Daftar Hadir Terlampir

Notulis                  JUNAIDI, S.Sos                      Kepala Kantor Kesbangpol

I.	Dasar	:	Surat Sekretariat Daerah Nomor: 100/50/KBP-2018 tanggal 2 Mei 2018 Perihal Undangan
II.	Pelaksanaan Rapat	A	Rapat dibuka oleh Bapak Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Solok
		B	<p>Penyampaian dari KOMNAS HAM RI</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Komnas HAM RI memohon maaf karena langsung terjun kelapangan karena ingin mengetahui langsung apa gejolak dan persoalan-persoalan yang terjadi di lapangan.</li><li>2. Komnas HAM telah menerima laporan terkait dengan geothermal, dan perwakilan Komnas HAM Sumatera Barat telah datang ke lapangan dan telah dilaporkan ke pusat dan langsung ditangani.</li><li>3. KOMNAS HAM RI sangat perlu meninjau kelapangan sehingga mendapatkan informasi secara langsung dan lengkap.</li><li>4. Telah dilaksanakan pertemuan pada hari ini dengan warga dan telah mendengar cukup banyak keluhan warga, dan saat ini warga mengalami kondisi ketakutan karena adanya informasi terbaru mengenai adanya pelatihan militer di lokasi tersebut.</li><li>5. Warga menyampaikan terkait proses pembangunan geothermal tidak diberi penjelasan mengenai bagaimana dampak negatif dari pemangunan geothermal.</li></ol>
		C	<p>Penyampaian Plt. Sekretaris Daerah (Drs.H.SUHARMEN,MM)</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Penyampaian kronologis dari permasalahan yang terjadi pada pemangunan Geothermal di Nagari Batu Bajanjang ke KOMNAS HAM RI.</li><li>2. Sebetulnya dampak negative dan dampak positif mengenai pembangunan Geothermal telah di sampaikan langsung ke masyarakat baik dari pihak Pemda dan Pihak PT. Hitay sendiri.</li><li>3. Masyarakat yang ditemui oleh KOMNAS HAM RI adalah masyarakat yang menolak pembangunan ini dilaksanakan.</li><li>4. Telah sering dilaksanakan rapat mengenai pembangunan Geothermal baik di tingkat kabupaten maupun provinsi bersama Forkopimda.</li></ol>

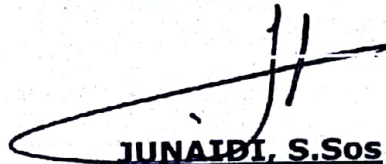


			<p>5. Pemda Kabupaten Solok telah menghadirkan narasumber yang ahli mengenai Geothermal dari UI tetapi masyarakat masih menolak pembangunan proyek ini.</p> <p>6. Telah di datangi juga oleh Tim Wantannas tetapi Tim Wantannas mengatakan kalau kunjungannya tidak focus membahas mengenai pemangunan Geothermal</p> <p>7. Telah dilaksanakan juga rapat dengan Bapak Gubernur Sumatera Barat bersama Forkopimda Provinsi pada tanggal 25 April 2018.</p> <p>8. Telah disarankan kepada PT. HITAY untuk tidak melaksanakan aktifitas sementara waktu.</p>
		D	<p>Penyampaian oleh Polres Solok</p> <p>1. Masalah Geothermal dari awal sampai keadaan hari ini Pemda tidak bisa nego dengan masyarakat karena harga mati untuk penolakan pembangunan Geothermal.</p> <p>2. Kami hanya sebagai pengaman dan kami melihat ada pro dan kontra dalam masyarakat sehingga menyebabkan beberapa dari anggota terluka pada saat kunjungan ke lokasi.</p> <p>3. Pelatihan TNI yang akan dilaksanakan tidak dilaksanakan di lokasi bermasalah tetapi jauh dari lokasi pembangunan Geothermal dan pelatihan ini tidak terkait dengan pembangunan Geothermal karena sudah direncanakan jauh -jauh hari sebelum konflik ini terjadi.</p>
		E	<p>Penyampaian dari Dinas Penanaman Modal</p> <p>1. Sebelumnya telah dilaksanakan sosialisasi oleh Dinas Pertambangan tetapi tidak ada penolakan.</p> <p>2. Secara perizinan pusat yang berwenang memberikannya sedangkan dari pemkab hanya memfasilitasi izin lokasi.</p> <p>3. Pada Media Massa yang beredar selalu memojokkan Polisi padahal polisi sudah kewalahan melakukan pengamanan pada saat permasalahan yang terjadi.</p>
		F	<p>Penyampaian dari DLH</p> <p>1. Sikap masyarakat yang tidak mau berkomunikasi dengan Pemda</p> <p>2. Ada oknum-oknum yang menghasut masyarakat yang menyebabkan kekacauan terjadi seperti LBH.</p> <p>3. Telah terjadi intimidasi ke masyarakat yang Pro oleh masyarakat yang kontra sehingga kehidupannya menjadi tidak tenang.</p> <p>4. Penyampaian oleh masyarakat kalau proyek nasional dan penyelesaiannya seharusnya juga nasional.</p>
		G	<p>Penyampaian dari Kabag Perekonomian</p> <p>1. Tidak terjadi persoalan HAM di Kabupaten Solok</p> <p>2. Yang dilakukan oleh Pemda secara persuasif tidak melakukan secara kekerasan</p> <p>3. Pemda tidak menganggap masyarakat sebagai lawan tetapi kami lebih mengutamakan kepentingan masyarakat</p>



		H	Penyampalan oleh Kejaksaan 1. Pada saat persidangan masyarakat banyak yang hadir sekitar 100 orang lebih
		I	Tanggapan oleh Komnas HAM RI 1. Kami berharap permasalahan ini bisa kita selesaikan 2. Bentrok sebaiknya harus dicegah 3. Komunikasi yang tidak baik seharusnya di tindak lanjuti 4. Pemda lebih terbuka mengenai agenda-agenda yang akan dilaksanakan terkait pembangunan Geothermal kepada masyarakat 5. Terkait dengan Bulan Ramadhan yang akan datang sebaiknya diberikan ketenangan kepada masyarakat 6. Komnas HAM RI akan mencoba melihat dari sisi pro dan kontra terkait pembangunan ini.
III.	Kesimpulan	:	1. Pemda akan lebih terbuka mengenai agenda-agenda yang akan dilaksanakan terkait pembangunan Geothermal kepada masyarakat 2. Pemda berharap Komnas HAM RI dapat membantu penyelesaian konflik yang terjadi

Notulis

  
**JUNAIDI, S.Sos**

NIP. 19620617 198612 1 001

*Akta*  
*Agar Komnas HAM RI lebih lanjut*  
*Soefford*

*Kakan Kertanegara*  
*Untuk Gihndalajih dengan*  
*bilal terkait RY 18*